

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Definisi dan Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang berkaitan dengan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi standar hidupnya (Usman, 2004). Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan bahwa “Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan”. Kemiskinan seringkali bersifat multi dimensional yang memiliki arti bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam, sehingga memiliki banyak aspek dari kemiskinan. Pertama adalah aspek primer yang berupa miskin akan aset, pengetahuan, keterampilan serta organisasi sosial politik. Kedua adalah aspek sekunder yang meliputi miskin akan sumber-sumber keuangan, jaringan sosial, dan informasi. Kedua dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan air, gizi, tingkat pendidikan yang rendah, perumahan yang sehat, dan perawatan kesehatan yang kurang baik (Arsyad, 1999). Arsyad juga menambahkan bahwa aspek lainnya dari kemiskinan adalah bahwa yang miskin itu

manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Bahkan kita pernah mendengar istilah kemiskinan perdesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun demikian, bukan berarti desa atau kota tersebut yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) di daerah tersebut yang miskin.

Paul Spicker (2002) dalam Dama dkk (2016) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan di bagi menjadi 4 yaitu:

1. *Individual Explanation*, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh karakteristik orang golongan miskin itu sendiri. Contoh spesifiknya adalah kegagalan dalam pekerjaan, pilihan yang tidak benar, belum siap mempunyai anak, cacat bawaan, malas dan sebagainya.
2. *Familia Explanation*, adalah kemiskinan yang dikarenakan faktor keturunan. Dimaksudkan bahwa diantara generasi terjadi ketidakberuntungan yang terjadi berulang, terkhusus akibat kurangnya pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.
3. *Subcultural Explanation*, adalah akibat dari karakteristik perilaku di suatu lingkungan yang berdampak pada moral masyarakat hingga menyebabkan kemiskinan.

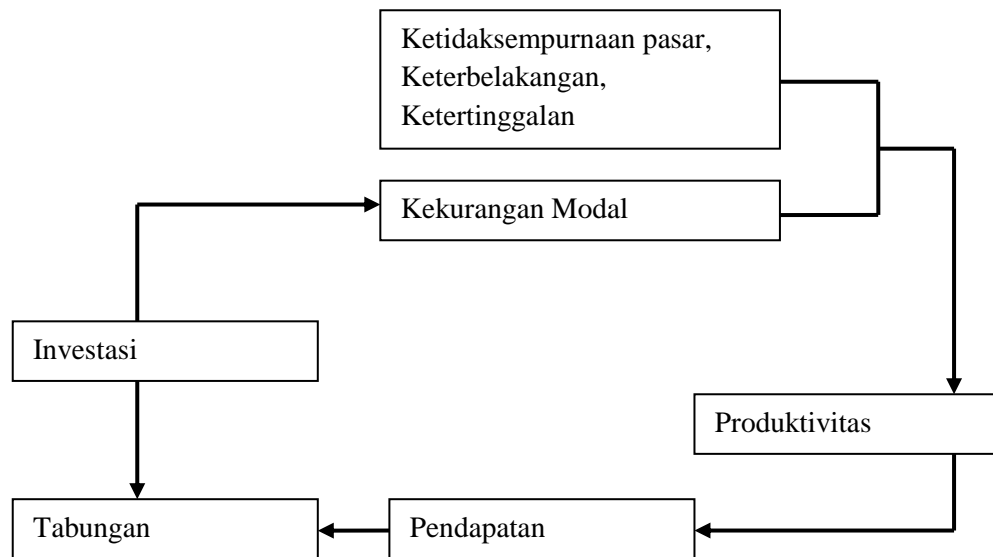
4. *Structural Explanation*, kemiskinan yang dimaksud sebagai produk dari masyarakat yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak atau perbedaan status.

Sharp, et.al (1996: h. 173-191) dalam buku Kuncoro (1997) menguraikan penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi:

1. Dari segi mikro, munculnya kemiskinan karena terjadi ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, masyarakat golongan miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah terbatas serta kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan yang timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya mengartikan bahwa produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Penyebabnya karena pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, terjadi diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Penyebab kemiskinan karena perbedaan akses dalam modal. Dimana ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil,

rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal.

Penyebab kemiskinan yang terjadi ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Akibat dari rendahnya produktivitas akan menurunkan pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Berikut ini merupakan gambaran lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse:



Sumber : Nurkse dalam Kuncoro (2010)

**Gambar 2.1**  
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

## 2. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang dijelaskan oleh Arsyad (1999) menjelaskan 2 jenis ukuran yang sering digunakan, yaitu kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relative (*relative poverty*).

### (1) Kemiskinan Absolut (*Absolute poverty*)

Konsep kemiskinan absolut ini di sangkutpautkan dengan perkiraan tingkat kebutuhan dan pendapatan. Perkiraan kebutuhan yang dimaksud hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara laik. Ketika pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum, maka seseorang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, pengukuran tingkat kemiskinan dapat dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan tolak ukur antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai batas kemiskinan. Konsep ini diperlukan untuk menentukan tercukupinya tingkat pendapatan minimum agar memenuhi kebutuhan fisik yang menjamin kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

Kesulitan utama dalam konsep Kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum dikarenakan kedua

hal tersebut tidak cukup dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, akan tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, iklim yang terjadi dan bermacam faktor ekonomi lainnya. Walau demikian, agar dapat hidup laik seseorang memerlukan berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Kebutuhan pokok/dasar dapat di bagi menjadi 2 golongan yang terdiri dari kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia kedalam 3 kelompok. Pertama, kebutuhan fisik primer yang berupa kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup. Ketiga, kelebihan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kebutuhan dasar tidak cukup meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia.

## (2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut, dimana konsep ini bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Orang yang sudah memiliki tingkat pendapatan dimana ia mampu

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tidak berarti tidak miskin. Seorang ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah memenuhi tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya masih jauh lebih rendah, maka orang tersebut masih dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Kriteria statistik BPS untuk 2012 adalah (Hudiyanto, 2017):

1. Tidak miskin, mereka yang mengeluarkan per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 – Rp 350.610.
3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 – Rp 280.488.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.740 kebawah.

### **3. Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan dilandaskan pada konsumsi yang terdiri dari 2 elemen yaitu: (1) pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang menggambarkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hitungan biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain adalah dengan melihat harga-harga menu makanan golongan miskin. Sedangkan, anggapan mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama serta sangat bervariasi antar budaya yang satu ke budaya yang lain. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin menggambarkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif terkait kesejahteraan. Pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, anggapan mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah (Kuncoro, 2010).

Menurut Kuncoro (2010) Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas kemiskinan melalui komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang diurutkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS dalam metodenya menyatakan bahwa kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang



merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan diartikan sebagai jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan (*non-food line*). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak dan lain-lain). Garis kemiskinan non-makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Tujuan dibedakannya garis kemiskinan ini adalah karena biaya hidup di kota dan di desa berbeda.

Garis kemiskinan versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-SK), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Berikut adalah 5 indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

#### **4. Indikator Kemiskinan**

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Arsyad, 1999).

##### **(1) Tingkat Konsumsi Beras**

Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

## (2) Indikator Kesejahteraan Rakyat

Ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang sering digunakan selain dapat pendapatan dan pengeluaran, yaitu meliputi konsumsi makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, kesempatan bekerja, perumahan yang layak, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

## 5. Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam konsep Islam menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan dan kemiskinan juga sebagai ancaman yang perlu diberantas karena berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dalam Al-Qur'an banyak menyoroti kemiskinan sebagai persoalan manusia atau sifat yang berhubungan dengan diri manusia. Pandangan Al-Qur'an tentang kemiskinan lebih dominan bersifat structural yang artinya kemiskinan lebih banyak disebabkan karena sistem struktur sosial dan politik (Lubis, 2018). Hadist Nabi Muhammad SWA yang berkaitan tentang Kemiskinan adalah:

### 1. Hadist Riwayat Abu Daud

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم

Artinya: Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, menceritakan kepada kami Hammad, mengabarkan kepada kami Ishaq, dari Abdullah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW berdoa: "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kekafiran, kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi". (HR. Al-Nasa'i)

## 2. Hadist Riwayat Ibnu Majah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد قالوا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد ابن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرنني في زمرة المساكين

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Sinan dari api al-mubarak dari 'atha' dari api Sa'id al-khudry, ia berkata, "Cintailah orang miskin, saya mendengar nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang miskin". (HR. Ibn Majah)

### a. Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Rezeki setiap manusia di muka bumi ini telah dijamin oleh Allah SWT, maka kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 6 dan QS. Al-Dzariyat ayat 58:

ضَالًّا زَيْفَادًا بَنِي مَنُومٍ عَلَا لَا رِزْقَ هَالِكٍ وَيَعْلَمُ وَمُسْتَوْدَعَهَا مُسْتَفْرَةٌ  
كُلُّ كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya: *Dan tidak suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (QS. Hud [11]: 6).*

إِنَّ اللَّهَ الرَّزَّاهُ الْقَوُّوْدُ أَقْوَ الْمَتِينُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (QS. Al-Dzariyat [51]: 58).*

Dalam HR. Abu Daud, Rasulullah pernah berdoa yang mana berbunyi: “Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran” yang berarti bahwa mewajibkan setiap individu keluar dari kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran, oleh

karena itu setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dilakukan dengan cara membangun etos kerja individu. Etos kerja mengandung semangat untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dimana hal ini juga dikaitkan dengan konsep Islam tentang perubahan sosial, termasuk juga didalamnya tentang perubahan ekonomi. Salah satu ayat yang mendorong setiap individu untuk membangun etos kerja adalah QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

اٰذْكُرُوْا اللّٰهَ فَمَنْ لَّمْ يَذْكُرْهُ لَحِقَ بِهٖ الضَّلٰلَةُ سٰبِغًا وَّالَّذِيْ يَدْعُوْا اِلٰى فِتْنَةٍ سٰبِغًا وَّالَّذِيْ يَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ سٰبِغًا وَّالَّذِيْ يَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ سٰبِغًا

اللّٰهُ تَفْلِحُوْنَ اَلْعٰلَمِ كَثِيْرًا

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10).

## 6. Hubungan Antar Variabel

### a. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Hadi Sasana (2006) dalam Parwata dkk (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam

suatu periode. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka berpotensi semakin besar pula sumber penerimaan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau pada perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak. Namun, perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik (Arsyad, 1999).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang diantaranya:

1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu masa perburuan, masa beternak, masa bercocok-tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Oleh karena itu, pembagian kerja merupakan titik sentral dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti peningkatan keterampilan kerja dan penemuan mesin-mesin yang

hemat tenaga. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat (Kuncoro, Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, 2010).

## 2. Teori David Ricardo

David Ricardo memberikan perhatian pada peranan manusia dalam pertumbuhan ekonomi atau output nasional (GDP) yang bergantung pada jumlah penduduk (sebagai tenaga kerja). Ketika jumlah penduduk meningkat pesat maka akan meningkatkan output. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk menurun maka tingkat output juga akan turun. Begitu pula bila jumlah penduduk konstan maka berpengaruh pada tingkat output yang juga akan konstan. Ricardo dalam hal ini menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku. Bila tingkat upah di atas upah yang disebutkan pas-pasan untuk hidup (*subsistence*), akan ada kecenderungan jumlah penduduk meningkat karena setiap orang



merasa mampu hidup sejahtera dan karena itu menambah jumlah anaknya. Namun kecenderungan ini justru mendorong penurunan tingkat upah dikarenakan besarnya penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah di bawah tingkat upah yang pas-pasan (upah minimum), jumlah penduduk akan cenderung menurun mengingat ketidakmampuan tiap orang untuk menanggung beban hidup dengan keluarga yang banyak. Penurunan jumlah penduduk tersebut selanjutnya akan meningkatkan tingkat upah. Upah akan naik turun, begitu pula dengan jumlah penduduk. Namun dalam jangka panjang tingkat upah akan cenderung sama dengan tingkat upah yang pas-pasan (upah minimum) untuk hidup sehingga tidak ada dorongan bagi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk.

Ricardo juga mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan dikarenakan output tergantung pada jumlah penduduk. Maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan cenderung tumbuh konstan, sehingga pendapatan perkapita akan konstan. Kondisi ini yang kemudian dikenal dengan kondisi yang stasioner: *Semua tumbuh pada laju yang sama, sehingga kondisi perekonomian akan konstan* (Hudiyanto, 2017).

### 3. Teori Harrod Domar

Harrod Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat tabungan. Kalau tingkat tabungan rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya Harrod Domar menekankan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin bila terjadi keseimbangan antara sisi produksi dengan sisi pengeluaran. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tingkat kecenderungan untuk menabung dalam masyarakat (Hudiyanto, 2017).

### 4. Teori Rostow

Rostow mencatat adanya tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dimana setiap negara mempunyai jalur yang lurus dari tahap tradisional sampai ke tahap konsumsi yang tinggi (Hudiyanto, 2017). Adapun lima tahap yang dialami setiap negara yaitu:

1. Tahap Masyarakat Tradisional (*traditional society*). Tahap ini memiliki ciri dalam masyarakatnya yaitu produksi perkapita dan produktifitas penduduknya sangat rendah, struktur sosial bersifat hirarkis yaitu tersusun dari atas ke bawah, dan pemerintahan seringkali terjadi sentralisasi.
2. Tahap Prasyarat untuk lepas landas (*precondition to take off*). Tahap ini merupakan tahap memasuki pertumbuhan yang mempunyai kekuatan yang terus menerus untuk tumbuh. Beberapa

ciri dari tahap ini yaitu terdapat peningkatan dalam tabungan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan investasi, investasi besar-besaran untuk sektor prasarana, dan terdapat aktivitas yang inovatif.

3. Tahap Lepas Landas (*take off*). Beberapa ciri dari tahap ini yaitu peningkatan investasi dari 5 menjadi 10 persen dari produk nasional neto, perkembangan dari satu atau beberapa sektor dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan terciptanya suatu kerangka dasar politik sosial dan kelembagaan yang mampu menciptakan perubahan bagi perluasan sektor modern.
  4. Tahap dorongan kearah ke kedewasaan (*drive to maturity*). Tahap ini industri pengolahan bergeser dari industri barang-barang modal menjadi industri barang konsumsi untuk konsumen domestic.
  5. Tahap konsumsi missal yang tinggi (*high massconsumption*). Pada tahap ini industri pasar mendominasi perekonomian, sementara sektor primer (pertanian dan pertambangan) mengalami penurunan, konsumsi missal pada produk mewah terjadi seperti mobil-mobil mewah.
5. Teori Joseph Schumpeter

Teori Joseph Schumpeter menekankan pentingnya inovasi sebagai sumber utama pembangunan. Schumpeter mencoba membedakan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan

perkembangan ekonomi (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena peningkatan faktor produksi yang digunakan. Sedangkan perkembangan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena adanya aktivitas inovasi dalam proses produksi. Inovasi yang dimaksudkan sebagai penerapan hal-hal (teknologi) baru di masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa itu berupa (1) penemuan produk baru, (2) penemuan sumber bahan baku baru, (3) penemuan teknik produksi baru, (4) penemuan pasar baru maupun (5) penemuan manajemen baru yang lebih efisien. Menurut Schumpeter kapan terjadinya inovasi tidak bisa diprediksi karena ia merupakan hasil dari kreatifitas. Schumpeter menambahkan bahwa proses pembangunan tidak akan bersifat mulus atau rutin atau regular melainkan akan berupa ledakan yang tidak bisa diprediksi, sesuai dengan sifat dan perkembangan kreatifitas manusia (Hudiyanto, 2017).

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat Produk Domestik Regional Brutonya. Dalam buku Hudiyanto (2017) dijelaskan bahwa PDRB dibagi menjadi tiga pendekatan:

1. Pendekatan pendapatan (*income approach*) yaitu berapa nilai pendapatan dari semua orang (gaji, bunga, sewa) dari penduduk (atau warga negara di suatu negara).
2. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh semua pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa (konsumen, pemerintah, dan investasi dunia bisnis).
3. Pendekatan produksi (*production approach*), yaitu berapa nilai produksi dari barang dan jasa dalam negara itu.

Berdasarkan Widodo (2006) dalam Parwata dkk (2016) PDRB dibagi menjadi PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB menurut harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya dapat mengarahkan pembangunan semakin mendekati tujuan. Boediono (1981) dalam Rusdarti dan Sebayang (2013) pertumbuhan ekonomi akan terwujud apabila

pertumbuhan PDRB melebihi laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, laju penurunan jumlah penduduk miskin sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmiyanti (2017) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan tidak meratanya pembangunan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Apalagi diperparah dengan pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang rendah terutama bagi masyarakat di pedesaan juga dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

#### **b. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Dalam Anggriawan (2016) upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Berdasarkan Kaufman dalam Anggriawan (2016) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dalam Sudirman dan Andriani (2017) menguraikan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri

dari upah pokok sekaligus tunjangan tetap. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah suatu jumlah imbalan yang pekerja terima secara tetap dan teratur pembayarannya serta tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi tertentu. Penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan untuk tujuan sebagai jaminan pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak terjadi eksploitasi dalam pekerjaan dan menghasilkan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Menurut Waluyo dalam Anggriawan (2016) hubungan antara upah minimum dan kemiskinan terjadi karena adanya biaya sosial inflasi dimana biaya sosial inflasi membuat seseorang yang miskin semakin miskin. Biasanya upah tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang dicetak pemerintah. Para pekerja tidak akan melihat upah mereka naik lebih cepat ketika pemerintah menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang. Tetapi jika inflasi lebih lambat perusahaan atau sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, maka akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah minimum yang lebih kecil. Jika upah itu tidak mampu menutupi kebutuhan hidup minimum, maka akan terjadi masalah kemiskinan. Menurut Acemoglu dalam Kurniawati, Gunawan dan Indrasari (2017) upah minimum meningkatkan kondisi ekonomi pekerja dengan upah rendah, sehingga upah minimum berkontribusi pada pengurangan kemiskinan

pekerja. Upah minimum menggeser komposisi *employment* menuju pekerjaan dengan upah tinggi.

### **c. Hubungan Pengeluaran Perkapita dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Pengertian Pengeluaran Perkapita menurut Badan Pusat Statistik adalah besar biaya yang dikeluarkan untuk dikonsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan. Konsumsi yang dimaksud berupa pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran menjelaskan tentang konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga bisa dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka akan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, pola pengeluaran bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan teori Ernest Engel dalam Salvatore (2006) menjelaskan bahwa “Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga maka semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan”. Dengan kata lain, sebuah keluarga akan lebih sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan



lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk non pangannya. Dalam hal ini menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan keluarga, maka akan semakin besar pengeluarannya untuk non pangan.

Ernest Engel juga menambahkan bahwa apabila variabel selera dianggap sama, maka persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran akan semakin baik pula tingkat perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Finkayana dan Dewi (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh konsumsi perkapita secara negatif dan signifikan. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin disuatu daerah, dikarenakan semakin tinggi pengeluaran perkapita seseorang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Pengeluaran perkapita menunjukkan gambaran tingkat daya beli seseorang atau masyarakat, dan kesejahteraan seseorang dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan inflasi lebih rendah dari nominal pengeluaran rumah tangga pada periode yang sama.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang bervariasi, diantaranya: Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Perkapita. Berikut ini penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik di atas dan menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1	Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan dan Disty Putri Ratna Indrasari, 2017, Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014	Metode regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upah Minimum</li></ul>	1. Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan
2	Ridzky Giovanni, 2018, Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan	Analisis Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"><li>• PDRB</li><li>• Pengangguran</li><li>• Pendidikan</li></ul>	1. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel Pengangguran

	Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016			berpengaruh positif dan tidak signifikan 3. Variabel Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan
3	Sussy Susanti, 2013, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel	Analisis regresi linear panel data dengan bantuan STATA 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• IPM</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>2. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>3. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan</li> </ol>
4	I Putu Arya Finkayana dan Made Heny Urmila Dewi, 2016, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2004-2013	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Angka Harapan Hidup</li> <li>• Rata-rata Lama Sekolah</li> <li>• Angka Melek Huruf</li> <li>• Pengeluaran Perkapita</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>2. Variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>3. Variabel Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh</li> </ol>

				<p>negatif dan signifikan</p> <p>4. Variabel Angka Melek Huruf negatif dan signifikan</p> <p>5. Variabel Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan</p>
5	Satria Yuda Anggriawan, 2016, Pengaruh Upah Minimum dan Disitribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur	Analisis regresi linier data panel dengan metode <i>Common Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah Minimum</li> <li>• Distribusi Pendapatan</li> </ul>	<p>1. Variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>2. Variabel Distribusi Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan</p>
6	Desi Rahmiyanti, 2017, Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Fasilitas Kesehatan terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun	Metode analisis regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB</li> <li>• IPM</li> <li>• Fasilitas Kesehatan</li> </ul>	<p>1. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>2. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan</p> <p>3. Variabel Fasilitas Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan</p>

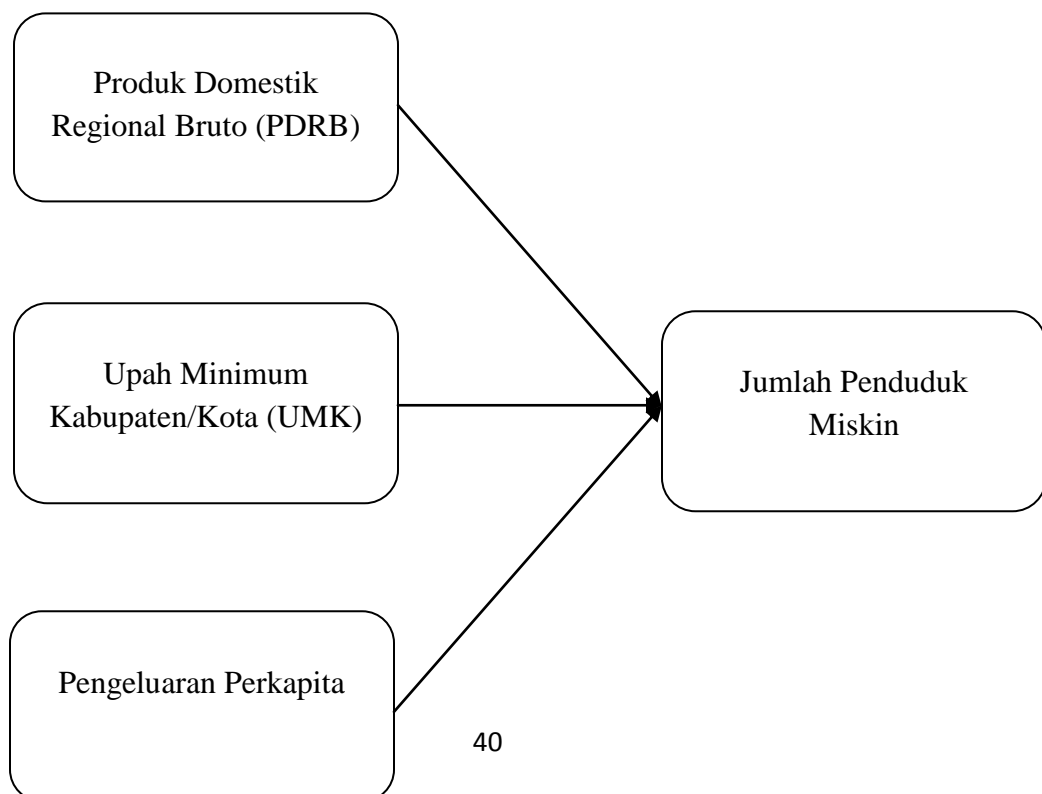
	2011-2015			
7	Irma Setiawati, 2017, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang	Analisis regresi bergandengan pendekatan OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Domestik Regional Bruto</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Tenaga Kerja</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>2. Variabel Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>3. Variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan</li> </ol>
8	Anna Marinda, Nasikh, Imam Mukhlis, Mit Witjaksono, Sugeng Hadi Utomo, Handoko, Hari Wahyono, Yohanes Hadi Soesilo, Moehariono & Setyobudi Santoso, 2017, The Analysis of the Economic Growth, Minimum Wage, And Unemployment Rate to the Poverty level in East Java	Metode Regresi Data Panel dengan pendekatan <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , <i>Random Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Upah Minimum</li> <li>• Tingkat Pengangguran</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>2. Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>3. Variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan</li> </ol>
9	Mona Adriana, 2016,	Metode Regresi Data Panel,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan PDB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel pertumbuhan</li> </ol>

	Determinants of Poverty: Panel Data Analysisin Asean-5; 1990-2013	<i>Fixed Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Inflasi</li> <li>• Jumlah Penduduk</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Tingkat Buta huruf</li> </ul>	<p>PDB berpengaruh negatif dan signifikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>3. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>4. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>5. Variabel Tingkat Buta Huruf berpengaruh negatif dan signifikan</li> </ol>
10	Akhsyim Afandi, Dwi Wahyuni dan Jaka Sriyana, 2017, Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia	Analisis Regresi dengan Metode <i>Error Correction Model</i> (ECM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Investasi</li> <li>• Inflasi</li> <li>• Rasio Gini</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>2. Variabel Investasi berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>3. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan</li> </ol>

				signifikan 4. Variabel Rasio Gini berpengaruh positif dan tidak signifikan
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemikiran teoritis dan beberapa hasil kajian dari penelitian sebelumnya yang penulis lakukan mengenai berbagai hubungan antara variabel independen (Jumlah Penduduk, PDRB, UMK, Tenaga Kerja) dengan variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin), maka faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
Kerangka Berpikir

**D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Diduga Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.